

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA
DI DESA KARANGANOM KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN**

SKRIPSI

Oleh :

MAULIDIYAH SYIFA'UL QULUB

NIM : G72215013



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Maulidiyah Syifa'ul Qulub
NIM : G72215013
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi
Judul Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi dalam Penyusunan
Laporan Keuangan dan Pengelolaan Dana Desa di
Desa Karangnom Kecamatan Karangbinangun
Kabupaten Lamongan

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 05 Agustus 2019



ing menyatakan

Maulidiyah Syifa'ul Qulub

NIM. G72215013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Maulidiyah Syifa'ul Qulub NIM. G72215013 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 Agustus 2019

Pembimbing,



Lilik Rahmawati, MEI

NIP. 198106062009012008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Maulidiyah Syifa'ul Qulub, NIM. G72215013 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang akuntansi.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Lilik Rahmahwati, MEI

NIP. 198106062009012008

Penguji II



Deasy Tantriana, M.M

NIP. 198312282011012009

Penguji III



Mohammad Khusnu Milad, M.MT

NIP. 197901292014031002

Penguji IV



Nurul Lathifah, S.A., M.A.

NIP. 198905282018012001

Surabaya, 03 September 2019

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM

NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MAULIDIYAH SYIFA'UL QULUB
NIM : G72215013
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI
E-mail address : DiyahS198@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN

KEUANGAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KARANGANOM

KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 September 2019

Penulis

(MAULIDIYAH SYIFA'UL QULUB)
G72215013

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II KERANGKA TEORITIS	24
A. Laporan Keuangan	24
1. Pengertian Laporan Keuangan	24
2. Jenis-jenis Laporan Keuangan.....	26
3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	30
4. Tahapan dalam Pembuatan Laporan Keuangan Desa.....	31
B. Dana Desa	32
1. Pengertian Desa.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwasanya “Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.¹ Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat yakni Kepala Desa yang dibantu dengan perangkat Desa.

Desa memiliki karakteristik yang beraneka ragam diantaranya aspek morfologi, aspek jumlah penduduk, aspek ekonomi, aspek hukum dan aspek sosial budaya. Kewenangan Desa menurut Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 adalah kewenangan yang dimiliki meliputi kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa.²

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 80 Ayat 3 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan Masyarakat Desa melalui

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 1

² Yuliansyah & Rusmianto, “*Akuntansi Desa*“, (Jakarta : Salemba Empat, 2016), 3

Perencanaan pembangunan desa ini tertulis secara rinci dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Dalam RPJMDesa tertulis visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang diperoleh.⁴ Setelah dilakukannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), terbentuklah laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. APBDDesa adalah dokumen formal hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan

⁴ Ibid, 23

Pemerintah Desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan dapat menutup keperluan belanja tersebut.⁵

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDesa. Pengelolaan APBDesa didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Berikut fungsi-fungsi APBDesa menurut Ardi Hamzah (2015)⁶ :

- a. Fungsi otorisasi, APBDDesa menjadi target fiskal yang digunakan untuk menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan sebagai panutan untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa untuk tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan, APBDDesa digunakan sebagai pedoman manajemen dalam perencanaan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan, APBDDesa digunakan untuk dasar pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi, APBDDesa diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa.
- e. Fungsi distribusi, kebijakan APBDDesa harus memperhatikan keadilan dan kepatutan masyarakat.
- f. Fungsi akuntabilitas, APBDDesa digunakan untuk pernyataan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik.

⁵ Ibid, 27

⁶ Ardi Hamzah, "*Tata Kelola Pemerintah Desa : Menuju Desa Mandiri, Sejahtera dan Partisipatoris*"; (Surabaya : Pustaka, 2015)

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintah
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman
- k. Partisipatif

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 24
ibid, 39

Menurut PERMENDES Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Dana Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.¹⁰

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016, menjelaskan bahwa rincian dana Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa.¹¹

10 PERMENDES Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

[illegible]

jasa/perdagangan, sektor industri, dan lain-lain. Mayoritas penduduk d

Karanganom adalah Buruh Tani.

Pada dasarnya, setiap Desa mendapatkan Dana Desa sesuai dengan

masing-masing. Penyaluran Dana Desa ini dilakukan secara be

Pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan ke

Desa. Pengelolaan Dana Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peru

undangan.

Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan Desa harus men

unsur *Good Governance* (tata kelola yang baik). Salah satu unsur

Governance adalah Akuntabilitas. Akuntabilitas publik adalah kewajiban

Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan Desa harus memenuhi unsur *Good Governance* (tata kelola yang baik). Salah satu unsur *Good Governance* adalah Akuntabilitas. Akuntabilitas publik adalah kewajiban

pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungja
menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan ke
yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prin*
yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungja
tersebut.¹² Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan Lembaga sektor
untuk lebih memperhatikan proses pertanggungjawaban laporan keu

¹² Mardiasmo, “*Akuntansi Sektor P*

1. Identifikasi Masalah

- Kurangnya pengetahuan dan wawasan perangkat desa dalam proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Kurangnya keterbukaan atau transparansi dalam proses pertanggungjawaban laporan keuangan Desa
- Proses penatausahaan yang kurang sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Proses pengelolaan Dana Desa yang masih kurang dan belum memenuhi prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas

Dalam penelitian ini, peneliti memberi Batasan atas permasalahan yang ada dikarenakan waktu yang singkat.

- [illegible]

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan dan masalah ini bukan merupakan duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.¹⁴ Berikut beberapa penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Masiyah Kholmi (2016), yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa : Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang“. Penelitian ini membahas

[illegible]

6. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Febri Arifiyanto & Taufik Kurrohman (2014), yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember”. Penelitian ini membahas tentang penerapan sistem pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa sudah menunjukkan bahwa pengelolaannya akuntabel dan transparan.²⁰

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan Dana Desa di Desa Karangnom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan pada Tahun 2016-2018

²⁰ Dwi Febri Arifiyanto dan Taufik Kurrohman, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember”, *Jurnal Riset Akuntansi dan keuangan*, Volume 2 (3), 2014, 473.

pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.²¹

b. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan keuangan dan lainnya kepada pihak yang membutuhkan informasi.²²

c. Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan merupakan suatu kegiatan memproses suatu data atau kumpulan data yang dilakukan oleh suatu organisasi maupun perorangan secara rapi dan teratur. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis tentang kinerja dan posisi keuangan suatu Lembaga/ organisasi/ perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan kualitas yang dipersyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku umum.²³

Jadi penyusunan laporan keuangan merupakan suatu kegiatan untuk memproses data-data tentang kinerja dan posisi keuangan suatu Lembaga/ organisasi/ perusahaan dalam suatu periode tertentu secara sistematis.

d. Dana Desa

Adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran

²¹ Mardiasmo, “*Akuntansi Sektor Publik*”, (Yogyakarta : ANDI Yogyakarta, 2004), 20

²² Arifin Tahir, *"Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah"*, (Bandung : Alfabeta, 2014), 109

²³ Mursyidi, "*Akuntansi Dasar*", (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), 121

Adalah Desa yang beralamatkan di Jalan Poros Desa Karanganom Kecamatan karangbinangun Kabupaten Lamongan. Desa Karanganom terdiri dari 2 dusun, 4 Rukun Warga (RW) dan 8 Rukun Tetangga (RT). Mayoritas penduduk Desa Karanganom hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang Pendidikan SD dan SMP. Masyarakat Desa Karanganom memiliki berbagai macam mata pencaharian yang dibagi dalam beberapa sektor yaitu sektor pertanian, sektor jasa/perdagangan, sektor industry, dan lain-lain. Dalam penelitian ini Akuntabilitas dan Transparansi dalam Desa ini akan ditinjau menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu

[illegible]

3) Bendahara Desa, data yang diminta adalah buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

5) Masyarakat, data yang diminta adalah pernyataan tentang bagaimana pertanggungjawaban dan keterbukaan terkait keuangan desa karanganom khususnya dana desa pada tahun 2016-2018.

Adalah data pendukung untuk penelitian ini yang berasal dari Literatur, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan proses penyusunan laporan keuangan Dana Desa. serta dokumen atau arsip tentang proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2016-2018.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

penyusunan laporan keuangan dalam pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dengan seseorang yang akan memberikan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan permasalahan yang dibahas.³¹

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.³² Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai Kepala desa yakni Bapak M.Ainur Rofiq, Bendahara Desa yakni Bapak Ian Charis, Sekretaris Desa yakni Bapak Suharno, BPD yakni Bapak Anwar, dan Masyarakat.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Secara detail bahan dokumen terbagi beberapa

³¹ Deddy Mulyana, *“Metodologi Penelitian Kualitatif: paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu social lainnya”*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008),180

³² Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D*”, (Bandung : Alfabeta, 2010), 320

macam yaitu : Autobiografi, Surat-surat pribadi, Buku, Kliping, Dokumen pemerintah maupun swasta, dan foto.³³ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Tahun Anggaran 2016-2018, dan Dokumen-dokumen yang terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan Desa.

4. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data merupakan kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan.³⁴ Ada beberapa tahapan untuk pengolahan data diantaranya sebagai berikut :

a. *Editing*

Editing merupakan proses pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban informan, hasil observasi, dokumentasi, memilih foto serta catatan-catatan lainnya.³⁵ Peneliti menggunakan tahap ini untuk proses pengecekan atau memeriksa kembali data-data yang sudah didapatkan. Data yang akan di cek lagi diantaranya : Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES), buku rekening Desa, dan data lain yang terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan Dana Desa.

³³ M. Burhan Bungin, “*Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi : Format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran*”, (Jakarta : Kencana, 2013). 154

³⁴ Ibid, 182

³⁵ Connie Chairunnissa, "*Metode Penelitian Ilmiah : Aplikasi dalam Pendidikan dan Sosial*", (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2017), 182

b. *Organizing*

Organizing merupakan proses menyusun data dari sumber dokumentasi sehingga dapat memperoleh gambaran sesuai dengan rumusan masalah penelitian, dan dikelompokkan sesuai variabel masing-masing.³⁶ Peneliti menggunakan tahap ini untuk proses penyusunan dokumen-dokumen yang didapat supaya mempermudah untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Data yang akan di susun diantaranya : Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES), buku rekening Desa, dan data lain yang terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan Dana Desa.

c. *Analyzing*

Analyzing merupakan proses memberikan analisis lanjutan terhadap hasil yang didapat dari proses *editing* dan *organizing* dengan menggunakan teori-teori yang sesuai dengan variabel penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan.³⁷ Peneliti menggunakan tahap ini untuk memberikan analisis terhadap data yang didapat dari Desa Karangnomo dengan menggunakan teori yang menjadi acuan untuk menganalisis. Data yang akan di analisis diantaranya : Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES), dan data lain yang terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan Dana Desa.

³⁶ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), 154

³⁷ Ibid, 196

I. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini dibagi menjadi 5 bab sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN : berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. BAB II KERANGKA TEORITIS : berisi tentang penjelasan teoritis mengenai variabel yang akan diteliti sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Materi yang akan dibahas adalah Laporan Keuangan, Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi, dan teori lain yang berhubungan dengan variabel penelitian.
3. BAB III DATA PENELITIAN : berisi tentang gambaran umum objek yang diteliti, meliputi sejarah Desa Karangnom, Struktur Organisasi, Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016-2018, dan data-data lain yang berhubungan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa.
4. BAB IV ANALISIS DATA : bab ini berisi tentang uraian tentang Analisa data mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan Dana Desa.
5. BAB V PENUTUP : berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap proses penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan Dana Desa di Desa Karangnom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

KERANGKA TEORITIS

A. Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pihak internal seperti manajemen perusahaan dan pihak eksternal seperti investor.¹

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat untuk para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.²

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam proses pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan³ :

¹ Hery, “*Akuntansi untuk Pemula*”, (Yogyakarta : Gava Media, 2014), 12

² Mursyidi, “Akuntansi Pemerintahan di Indonesia”, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), 59

³ Ibid., 60.

- Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD

[illegible]

- b. Neraca

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam asset lancar dan nonlancar serta kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka Panjang. Neraca berisi pos-pos sebagai berikut⁹ :

- ⁹ Mursyidi, *"Akuntansi Pemerintahan di Indonesia"*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), 72

- 4) Persediaan
 - 5) Investasi jangka Panjang
 - 6) Aset tetap
 - 7) Kewajiban jangka pendek
 - 8) Kewajiban jangka Panjang
 - 9) Ekuitas dana
- c. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas (LAK) merupakan laporan yang menyajikan informasi kas yang masuk dan keluar dari rekening bendahara umum Negara/Daerah selama periode tertentu. Informasi kas dibagi menjadi 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan operasional, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran.¹⁰

Pada dasarnya penerimaan dan pengeluaran yang tercantum dalam laporan arus kas sama dengan penerimaan dan pengeluaran yang ada dalam laporan realisasi anggaran. Akan tetapi ada transaksi keuangan pemerintah yang menimbulkan penerimaan dan pengeluaran kas tetapi tidak dianggarkan artinya transaksi tersebut tidak tercantum dalam laporan realisasi anggaran. Transaksi seperti ini disebut transaksi non anggaran.¹¹

¹⁰ Bahtiar Arif, “*Akuntansi Pemerintahan*”, (Jakarta : Akademia, 2009), 37

¹¹ Mursyidi, “*Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*”, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), 81

6) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ada 4 (empat) karakteristik sebagai berikut¹⁵ :

¹⁵ Ibid, 47

- a. Relevan, apabila informasi yang dimuat dapat mempengaruhi keputusan pengguna. Ciri informasi yang relevan yakni memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap.
 - b. Andal, informasi laporan keuangan yang bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Ciri informasi yang andal yakni penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas.
 - c. Dapat dibandingkan, informasi laporan keuangan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - d. Dapat dipahami, informasi yang disajikan dapat dipahami oleh pengguna.
4. Tahapan dalam Pembuatan Laporan Keuangan Desa
- Tahap dalam pembuatan laporan keuangan Desa sebagai berikut¹⁶ :
- a. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran
 - b. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.
 - c. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku investaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.

¹⁶ V. Wiratna Sujarweni, “*Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*”, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015), 23

B. Dana Desa

Desa atau udik menurut definisi *universal* adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan (*rural*). Desa mempunyai nama, letak, dan batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara satu Desa dengan Desa lainnya.¹⁸

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwasanya “Desa adalah

¹⁹ Ibid, 6

Jadi Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²¹ Penyelenggara pemerintahan desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa.

Secara khusus, Desa memainkan peran penting dalam menyediakan layanan infrastruktur pedesaan dan terlibat dalam kegiatan penurunan kemiskinan, kesejahteraan sosial, Pendidikan, dan kesehatan. Meskipun kebanyakan investasi dan pelayanan publik didanai oleh pemerintah namun ada beberapa sumber dana krusial yang didanai oleh Desa sendiri.²²

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang

²² Indra Bastian, “*Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa*”, (Jakarta : Erlangga, 2015), 10

- a. Pendapatan asli Desa
- b. Alokasi APBN
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi Dana Desa (ADD)
- e. Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan tidak mengikat
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.²⁴

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

- a. Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan jumlah Desa
- b. Dana Desa dialokasikan berdasarkan :
 - 1) Alokasi dasar, dan
 - 2) Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota
- c. Tingkat kesulitan ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi
- d. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang
- e. Dana Desa setiap Kabupaten/Kota ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN

Pengaturan untuk prioritas penggunaan dana Desa bertujuan untuk menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak masyarakat tanpa membedakan
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang mendesak dan sesuai kebutuhan masyarakat
- c. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan dan perkembangan kemajuan Desa

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan penyediaan sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan dan akses kehidupan masyarakat Desa.
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar Pendidikan, dan kesehatan.

²⁷ Ibid, 7

Sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat adalah untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu maupun kelompok.

Penyaluran dana Desa sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang memiliki 2 (dua) tahap penyaluran yaitu tahap I sebesar 60% pada bulan maret dan tahap II sebesar 40% pada bulan agustus. Penyaluran dana Desa ini disalurkan dengan perhitngan 90% berdasarkan pemerataan (alokasi dasar) dan sebesar 10% (alokasi formula).²⁸

Untuk bisa mendapatkan dana Desa, pemerintah Desa harus menjalankan mekanisme dan persyaratan penyaluran dana Desa. persyaratan penyaluran dana Desa tahap I pemerintah Desa harus menyerahkan laporan realisasi penggunaan dana Desa tahun sebelumnya dan menunjukkan peraturan Desa mengenai APBDes, kemudian tahap II pemerintah Desa harus menyerahkan laporan

[illegible]

a. Pengelolaan keuangan bukan hanya menjadi kewenangan pemerintah Desa tetapi juga hak milik masyarakat, karena itu perlu partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes, masyarakat perlu mengetahui secara transparan keuangan Desa, dan pemerintah Desa wajib bertanggungjawab dalam mengelola keuangan.

c. Bidang kemasyarakatan perlu dijadikan sebagai bagian dari program Desa dan mendapat dukungan dana yang cukup.

a. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini terkait dengan program Desa, dalam perencanaan program Desa dapat melibatkan partisipasi masyarakat, dengan mengoptimalkan musyawarah Desa. perencanaan program Desa menyangkut bidang pemerintahan, pembangunan dan

³³ Ibid, 10-17

Dalam perencanaan perlu menyusun sasaran dan hasil-hasil yang akan dicapai dari masing-masing program Desa, serta perlu merancang agenda kegiatan untuk mencapai hasil-hasil dari rencana program dan merancang jadwal kegiatan program dalam satu tahun.

Pada tahap ini terkait dengan pelaksanaan program yaitu kegiatan mengelola dan menggerakkan sumber daya manusia dan dana untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam tahap perencanaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tahap pelaksanaan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Desa bertanggungjawab melaksanakan kegiatan
- 2) Pemerintah Desa mengalokasikan dana untuk membiayai kegiatan
- 3) Kepala Desa melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan
- 4) Masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Pada tahap ini terkait dengan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara Desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank Desa serta setiap

- 1) Penatausahaan penerimaan Desa
- 2) Penatausahaan belanja Desa
- 3) Penatausahaan pembiayaan Desa
- 4) Dokumen penatausahaan oleh bendahara Desa
- 5) Laporan bendahara Desa
- 6) Penatausahaan oleh pelaksana kegiatan

Pada tahap ini, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan. Laporan semesteran berupa laporan realisasi APBDes dan laporan disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. Sedangkan laporan tahunan disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Pada tahap ini, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan dengan peraturan Desa. Kepala Desa juga melaporkan laporan

C. Akuntabilitas dan Transparansi

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya.³⁵

Akuntabilitas memiliki 3 (tiga) tingkatan yang dimulai dari akuntabilitas teknis, yaitu pertanggungjawaban terhadap input dan output. Selanjutnya akuntabilitas strategis adalah tuntutan terhadap pertanggungjawaban *outcomes* atau manfaat, seperti bentuk kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Dan

³⁴ Mardiasmo, “*Akuntansi Sektor Publik*”, (Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 2004), 20

³⁵ Penny Kusumastuti Lukito, "Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Ke Depan", (Jakarta: PT. Grasindo Anggota Ikapi, 2014), 2

Dilihat dari segi pemerintahan, akuntabilitas dibagi 3 jenis diantaranya³⁷:

- 1) Akuntabilitas politik, berkaitan dengan sistem politik dan sistem pemilu.
- 2) Akuntabilitas keuangan, artinya aparat pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang masuk dalam anggaran kepada pihak yang berkepentingan.
- 3) Akuntabilitas hukum, artinya rakyat harus memiliki keyakinan bahwa aparat pemerintah dapat bertanggungjawab secara hukum atas segala tindakannya.

Berikut ini adalah prinsip-prinsip akuntabilitas pada instansi pemerintah menurut BPKP³⁸ :

- 1) Harus ada komitmen pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.

³⁸ Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan RI, *“Akuntabilitas Dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip)”*, (Jakarta : LAN BPKP RI, 2000), 43

- ### c. Indikator Akuntabilitas

- 1) Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa
- 2) Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintah desa
- 3) Berkurangnya kasus KKN di dalam lingkup pemerintah desa

a. Pengertian Transparansi

³⁹ Loina Lalolo Krina, “*Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi*”, (Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003), 17

Sedangkan pengertian transparansi menurut beberapa ahli diantaranya⁴¹ :

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

Transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan dari pemerintah, organisasi, dan badan usaha.

Transparansi berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil.

⁴⁰ Arifin Tahir, “*Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*”, (Bandung : Alfabeta, 2014), 109

[illegible]

Pemerintah yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya. Segala tindakan dan kebijakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum.⁴²

Prinsip-prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, tetapi transparansi pemerintah juga menyangkut 5 (lima) hal sebagai berikut⁴³ :

- juga menyangkut 5 (lima) hal sebagai berikut⁴³ :
- 1) Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat memberikan pendapat.
 - 2) Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
 - 3) Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau penyusunan rencana).

⁴³ Mustopa Didjaja, “*Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi Kinerja*”, (Jakarta : Lan dan Duta Pertiwi, 2003), 261

DATA PENELITIAN

1. Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

Karanganom merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan. Desa Karanganom terdiri dari dua dusun yakni Karanganom Kulon dan Karanganom Wetan. Desa Karanganom memiliki luas wilayah 144,980 Ha yang terdiri dari sawah tambak 95,980 Ha, permukiman 35 Ha, dan lainnya 14 Ha. Sedangkan jumlah penduduk Desa Karanganom sebanyak 2.185 jiwa yang tersebar di dua dusun yang terdiri dari laki-laki sebanyak 985 jiwa dan perempuan sebanyak 1200 jiwa.

Penduduk di Desa Karanganom memiliki berbagai pekerjaan yang dibagi menjadi beberapa sektor yakni sektor pertanian, sektor jasa/perdagangan, sektor industri dan lain-lain. Tetapi mayoritas penduduk Desa Karanganom adalah buruh tani.

2. Sejarah Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

Asal usul Desa Karanganom berawal dari sebuah tanah pertikan yang sekarang bernama Kenoman Wetan / Karanganom Wetan yang pada mulanya bernama Demangan. Nama Demangan diambil dari nama orang yang pertama kali memimpin / membuka atau dalam istilah

jawanya “mbabati”. Beliau adalah seorang saudagar kaya dan berdarah biru dari Lamongan yang berdagang dan akhirnya menikah dan menetap di Desa Karanganom.

Nama Karanganom ini merupakan nama yang ketiga setelah mengalami beberapa perubahan yang pada asalnya bernama Demangan lalu diganti dengan nama Kenoman hal ini terjadi pada masa pemerintahan petinggi / Kepala Desa yang kedua yakni Mbah Dolat. Kemudian pada masa pemerintahan Kepala Desa ketiga yakni Mbah Kamsidin mengubah nama Kenoman menjadi Karanganom. Namun beberapa tahun kemudian nama Karanganom dianggap tidak cocok dengan kepercayaan masyarakat yang mana menurut keyakinan warga pada saat itu Karanganom artinya Karang yang enom / Karang yang mudah (gampang runtuh), hal tersebut diyakini karena setiap warga pada saat itu bila mempunyai rencana atau gagasan kebanyakan gagal sehingga nama Karanganom diganti menjadi Karangmulya. Akan tetapi karena perubahan nama tersebut tidak terdokumentasi maka nama Karangmulya hilang dengan sendirinya, hingga sampai sekarang yang tercantum dan tersebut sebagai nama Desa yang resmi adalah Karanganom, namun nama Kenoman juga masih disebut-sebut oleh masyarakat sekitar Desa Karanganom terutama yang sudah berusia lanjut.

4. Visi dan Misi Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan mempunyai visi dan misi yang digunakan sebagai acuan dalam mencapai tujuan dan target Desa.

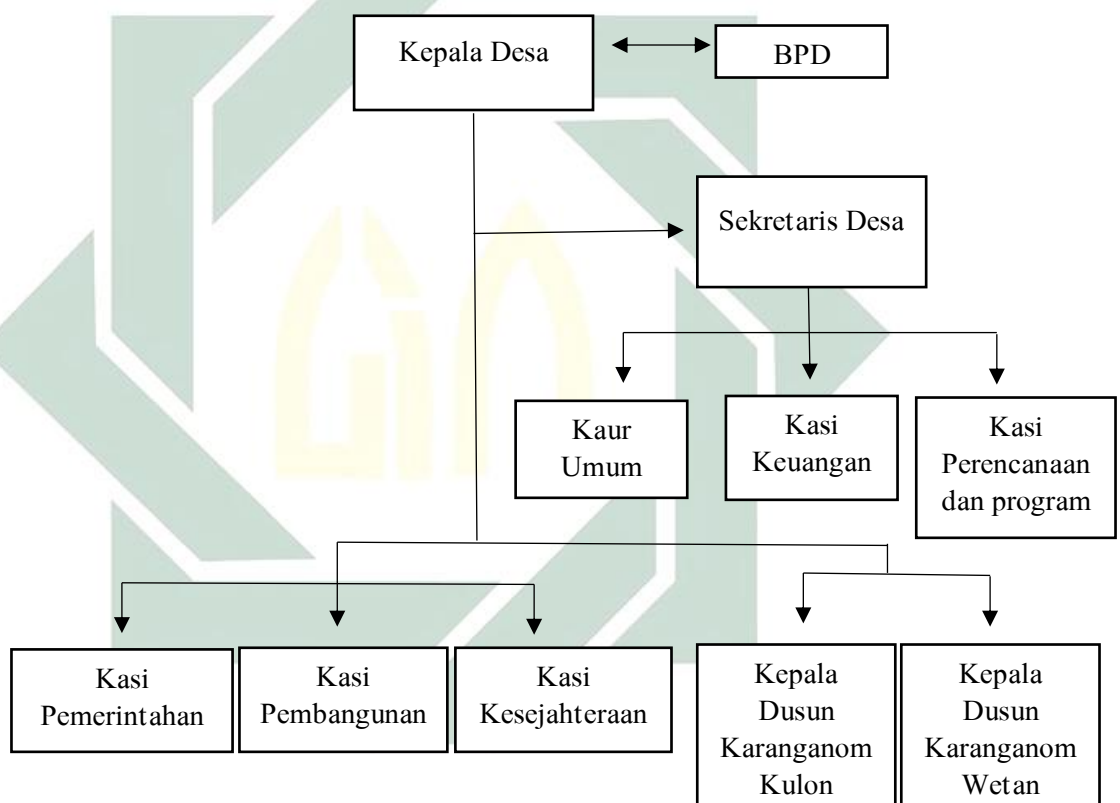
Adapun visi dan misi Desa Karangnom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

- a. Visi

5. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik.
6. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah.

5. Struktur Organisasi Desa Karangnom Kecamatan Karangbinangun

Kabupaten Lamongan



(Sumber : wawancara dengan Sekretaris Desa)

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Desa

B. Pengelolaan Dana Desa di Desa Karangnomo Kecamatan Karangbinangun

Kabupaten Lamongan Tahun 2016 hingga 2018

Pengelolaan dana Desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

1. Perencanaan Dana Desa di Desa Karangnomo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

“Proses perencanaan dana Desa dilakukan dengan musyawarah dulu mbak untuk membahas dana Desa digunakan untuk apa saja dan berapa anggarannya. Tapi sebelum itu perangkat Desa sudah membuat sebuah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) jadi pada saat musyawarah tinggal menyampaikan ke masyarakat dan meminta tanggapan mereka”¹

[illegible]

Setelah hasil musyawarah keluar dan masyarakat setuju dengan semua yang sudah direncanakan selanjutnya akan dibentuk tim pelaksana (timlak) masing-masing dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Masyarakat Karanganom sebagai berikut :

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa Karangantom menganut peraturan Menteri dalam negeri, peraturan Bupati Lamongan, Peraturan Desa dan lainnya sesuai dengan tahun yang bersangkutan.

³ Suharno (Sekretaris Desa), Wawancara, Lamongan 10 juni 2019

Penatausahaan adalah proses ketiga dalam pengelolaan dana Desa. Dalam penatausahaan ini dipegang oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh Bendahara Desa. Berikut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa mengenai proses penatausahaan yang dilakukan :

Namun dalam penatausahaan ini yang paling berperan adalah Bendahara Desa. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai dilakukan maka pihak tim pelaksana (timlak) memberikan laporan anggaran biaya yang diperiksa oleh Sekretaris Desa. Jika sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa maka Bendahara Boleh melakukan Pembayaran untuk pembangunan tersebut.

Dalam proses penatausahaan terkadang ada kendala dalam hal bukti-bukti dari hasil pelaksanaan kegiatan yang tidak lengkap atau bahkan hilang.

⁷ Ian Charis (Bendahara Desa), Wawancara, Lamongan 10 Juni 2019

Pertanggungjawaban adalah proses kelima dalam pengelolaan dana Desa. Untuk tahap ini pihak yang sangat berperan adalah Kepala Desa, karena Kepala Desa sebagai Kepala yang bertanggungjawab atas semua pengeluaran dan penerimaan dana yang diterima Desa Karanganom.

Pertanggungjawaban keuangan desa harus dilakukan secara transparansi dan akuntabel. Begitu juga dengan Dana Desa harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel kepada pihak yang berkepentingan yakni pemerintah kabupaten, kecamatan, dan masyarakat.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat yakni dengan melakukan evaluasi terkait dana Desa yang sudah digunakan. Hal ini seperti pernyataan Kepala Desa :

“Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat yah salah satunya mengadakan evaluasi mbak”¹⁰

[illegible]

Pemerintah desa juga membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terkait penggunaan keuangan desa yang termasuk didalamnya ada Dana Desa yang akan di laporkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Selain kepada pemerintah Desa, peneliti juga mewawancarai Masyarakat dan BPD untuk pertimbangan terkait pertanggungjawaban pemerintah Desa atas keuangan Desa.

Dalam wawancara peneliti memberikan beberapa pertanyaan tentang penilaian kinerja pemerintah desa dalam hal pertanggungjawaban berikut hasil wawancara ;

“saya sebagai anggota BPD merasa sudah tidak dibutuhkan lagi, karena BPD hanya sebagai pendengar saat musyawarah berlangsung, dan memang BPD bertugas untuk mengawasi saja jalannya proses pelaksanaan pembangunan Desa itu”¹¹

“untuk transparansi pemerintah desa tidak memberitahu masyarakat mengenai jumlah anggaran yang terrealisasi mbak jadi saya juga kurang tau apakah anggarannya digunakan seluruhnya atau tidak”¹²

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih kekurangan informasi mengenai laporan keuangan desa karena kurangnya keterbukaan dari pihak pemerintah Desa.

**C. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa
Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun
2016 hingga 2018**

Akuntabilitas dan Transparansi merupakan salah satu syarat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

¹¹ Anwar (BPD), Wawancara, Lamongan 17 Juni 2019

¹² Nur Hadi (Masyarakat Desa), Wawancara, Lamongan 10 Juni 2019

mempertimbangkan kemampuan dan kompetensi Desa dan tetap mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Masyarakat Desa. Setelah Musrenbangdes selesai dan mendapatkan hasil yang diinginkan secara mufakat, maka dibentuklah Tim Pelaksana (Timlak) untuk setiap kegiatan.

Tim Pelaksana (Timlak) bertugas menjalankan setiap kegiatan yang sudah di sepakati dalam Musrenbangdes. Setelah melaksanakan kegiatan Tim Pelaksana (Timlak) harus membuat laporan anggaran biaya dan diserahkan kepada Bendahara Desa untuk dilakukan pengecekan kemudian Bendahara Desa menyerahkan Kepada Kepala Desa untuk dilakukan verifikasi pencairan dana Desa yang kemudian Bendahara Desa akan mengeluarkan uang dari rekening Desa serta untuk membuat laporan yang akan diperlihatkan kepada masyarakat dan Lembaga-lembaga yang berkepentingan agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas yang mana hal ini masuk dalam proses penatausahaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Setelah melakukan kegiatan, maka Kepala Desa akan melaporkan Laporan realisasi anggaran kepada BPD dan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati/Walikota untuk dapat dipertanggungjawabkan.

Penggunaan dana Desa di Desa Karangnom diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat, seperti halnya dikatakan oleh Kepala Desa :

“Dana Desa di Karanganom ini hanya kita gunakan untuk pembangunan sama pemberdayaan masyarakat saja mbak seperti pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Rabat. Kalau dari aspek pemberdayaan masyarakat kita gunakan untuk membiayai PKK, posyandu, dan lainnya”¹³

Tahap pengalokasian dana desa dilakukan dengan mempertimbangkan aspek jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan geografis Desa agar mewujudkan pembangunan Desa secara lebih merata. Desa Karanganom mendapatkan Dana Desa sesuai dengan kondisi desa.

Berikut rincian dana Desa yang diterima di Desa Karangnomo :

Tabel 3.1. Rincian dana Desa yang diterima di Desa Karangnom

Tahun	Jumlah Dana Desa	Total APBDes
2016	606.478.550	1.444.522.400
2017	773.000.800	1.248.517.600
2018	664.847.000	1.243.445.400

(sumber : APBDES Tahun 2016-2018)

Setiap tahun dana Desa yang diterima oleh Desa Karangnomo tidaklah sama tetapi hampir setiap tahun meningkat dan cukup untuk membantu mencukupi anggaran Desa yang digunakan dalam pembangunan Desa.

Proses penyaluran dana Desa di Desa Karanganom dilakukan secara bertahap oleh pihak kabupaten seperti halnya Desa lainnya, tetapi setiap

¹³ M. Ainur Rofiq (Kepala Desa), Wawancara, Lamongan 22 Mei 2019

13.	Plesterisasi RTM	Rp. 5.000.000
14.	Kegiatan PMT	Rp. 7.728.000
Total Anggaran		Rp.773.000.800

(Sumber : Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Th.2017)

Tabel 3.4. Rincian Dana Desa Tahun 2018

No.	Kegiatan	Jumlah Anggaran
1.	Pembangunan dan Pemeliharaan Selokan/Drainase	Rp. 100.000.000
2.	Pembangunan Pelebaran Jalan Lingkungan Karanganom Wetan	Rp. 108.000.000
3.	Pembangunan Pelebaran Jembatan Karanganom	Rp. 50.000.000
4.	Pembangunan TPT Japordes Karanganom	Rp. 170.00.000
5.	Pembangunan TPT Rabat Beton Karanganom	Rp. 60.000.000
6.	Pembangunan TPT untuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Rp. 75.000.000
7.	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Polindes	Rp. 95.000.000
8.	Kegiatan Posyandu	Rp. 6.847.000
Total Anggaran		Rp. 664.847.000

(Sumber : Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Th.2018)

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Karangnom Kecamatan

Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2016 hingga 2018

Pengelolaan Dana Desa di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan telah menggunakan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam mengatur Pengelolaan dana Desa yang termasuk dalam keuangan Desa yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa.

Pemerintah Desa Karanganom dalam menyusun laporan dana desa tidak hanya menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), namun Pemerintah Desa Karanganom juga menggunakan Peraturan Bupati (PerBup) Lamongan.

Desa Karanganom merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kabupaten Lamongan dan termasuk Desa yang menerima Dana Desa. Untuk proses pengelolaan dana Desa di Desa Karanganom dimulai dengan perencanaan kegiatan dan anggaran yang akan digunakan setiap kegiatan. Perencanaan ini dilakukan dengan musyawarah bersama Tokoh Masyarakat dan Lembaga-lembaga yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan

keuangan Desa yang mana dalam proses perencanaan harus dilakukan dengan musyawarah untuk pengambilan keputusan yang mufakat.

Setelah pemerintah Desa melakukan Musyawarah dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Masyarakat dalam aspek pembangunan Desa maka dibentuklah Tim Pelaksana (Timlak) untuk masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tim Pelaksana (Timlak) bertugas untuk menjalankan semua kegiatan yang sudah disepakati dalam musyawarah. Setelah kegiatan yang dilaksanakan selesai pihak pelaksana membuat laporan anggaran biaya kegiatan yang harus dilaporkan kepada Bendahara Desa.

Bendahara Desa bertugas untuk membuat setiap laporan yang akan dilaporkan kepada Kepala Desa seperti laporan realisasi anggaran kemudian Kepala Desa bertugas untuk melaporkan laporan realisasi anggaran yang berisi pendapatan dan belanja Desa selama Tahun yang bersangkutan kepada Bupati/Walikota dan Masyarakat untuk pertanggungjawaban terhadap semua pendapatan yang sudah diterima serta pengeluaran yang sudah dilakukan.

Proses pengelolaan dana Desa yang ada di Desa Karanganyom dilakukan dengan menganut prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yakni akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

[illegible]

No.	Indikator	Teori	Data	Bukti
2.	Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat	Undang-undang Nomor 6 pasal 80 ayat (3) Tahun 2014 Tentang Desa bahwa “Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan Masyarakat Desa melalui musyawarah Desa”	Pemerintah Desa mengundang Masyarakat untuk ikut dalam Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang membahas mengenai program dan kegiatan serta anggaran Desa.	Ada, berupa foto pelaksanaan Musrenbangdes (Lampiran 5)
3.	Keterbukaan proses pengelolaan	Undang-undang Nomor 6 pasal 80 ayat (3) Tahun 2014 Tentang Desa bahwa “Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan Masyarakat Desa melalui musyawarah Desa”	Pemerintah Desa sudah melibatkan Masyarakat beserta Lembaga-lembaga yang ada di Desa Karanganom dalam Musrenbangdes yang membahas proses pengelolaan Dana Desa.	Ada, berupa foto pelaksanaan musrenbangdes (Lampiran 5)
4.	Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan Dana Desa	PERMENDAGRI Nomor 113 Pasal 40 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Desa bahwa “Laporan Realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada Masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat.”	Pemerintah Desa melaporkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa serta laporan pertanggungjawaban yang juga di laporkan kepada Masyarakat dan BPD.	Ada, berupa foto laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa (Lampiran 7)

Karangbinangun Kabupaten Lamongan

masyarakat.²

partisipasi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

perencanaan yang dilakukan di Desa Karangnom sudah dilalui dengan

² Didit Herlianto, “*Manajemen Keuangan Desa*”, (Yogyakarta : Gosyen Publishing, 2017), 10

Pada tahap ini terkait dengan pelaksanaan program yaitu kegiatan mengelola dan menggerakkan sumber daya manusia dan dana untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan dalam tahap perencanaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.³

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana Desa yang hanya diperbolehkan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat saja.⁴

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana Desa

4. Pelaporan Dana Desa di Desa Karangnomo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

Dalam hal ini Sekretaris Desa tidak berperan banyak hanya membantu dalam pengkoordinasian dengan Tim Pelaksana (Timlak) kegiatan untuk melakukan proses penatausahaan terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi tahap ini bisa dikatakan kurang akuntabel karena proses penatausahaan yang dilakukan terkadang tidak tepat pada tanggal yang ditentukan untuk pembuatan laporan.

Pada tahap ini, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada pihak

⁵ Didit Herlianto, “*Manajemen Keuangan Desa*”, (Yogyakarta : Gosyen Publishing, 2017), 13

Dari hasil wawancara dengan Bendahara Desa, Setelah proses penatausahaan tersebut, Bendahara Desa juga bertugas untuk membuat laporan-laporan yang terkait dengan proses pengelolaan dana Desa seperti laporan realisasi anggaran dan laporan keterangan pertanggungjawaban yang mana Bendahara Desa menggunakan beberapa buku pembantu seperti buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Laporan-laporan tersebut dibuat setiap kegiatan selesai dikerjakan agar pencairan untuk dana desa tahap selanjutnya bisa berjalan dengan lancar.

Dalam hal ini proses penatausahaan yang dilakukan di Desa Karanganom bisa dikatakan sudah transparan namun kurang akuntabel karena Bendahara Desa sudah melakukan tugas sesuai dengan jabatannya namun pelaporan yang dibuat terkadang tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan tanggal yang ditentukan.

5. Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Karangnom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

Pada tahap ini, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada pihak Kecamatan dan Kabupaten setiap akhir tahun anggaran.⁷

⁷ Ibid, 17

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa, Setelah semua laporan yang diperlukan untuk proses pertanggungjawaban selesai, maka tugas Kepala Desa untuk menyampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti Kecamatan, Kabupaten, BPD, dan Masyarakat setempat. Laporan yang disampaikan kepada pihak BPD adalah laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, dilakukan untuk proses transparansi atau keterbukaan antara Pemerintah Desa dengan pihak BPD atau badan yang mengawasi jalannya pengelolaan dana Desa. sedangkan kepada pihak Kecamatan dan Kabupaten, Kepala Desa melaporkan laporan realisasi penggunaan dana Desa atau APBDes yang didalamnya terdapat rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa selama Tahun yang bersangkutan. Untuk Masyarakat, Pemerintah Desa biasanya membuat Banner yang akan di pajang di sudut-sudut Desa agar Masyarakat mengetahui berapa dan untuk apa saja anggaran dana Desa yang diterima oleh Desa Karanganom.

Kepala Desa sudah melakukan proses pertanggungjawaban dengan baik karena sudah melaporkan laporan-laporan kepada pihak yang berkepentingan akan tetapi untuk transparansi kepada Masyarakat, Pemerintah Desa tidak memberikan informasi mengenai dana desa yang digunakan pada tahun 2018 tidak ada banner yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan dana Desa di Desa Karangnomo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan dana Desa yang ada di Desa Karanganom sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Disamping itu proses pengelolaan dana Desa melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban, namun untuk tahap penatausahaan hanya Pemerintah Desa yang mengurus. Meskipun pengelolaan dana Desa yang dilakukan sangat baik, namun pemahaman Pemerintah Desa dan Masyarakat mengenai kebijakan pengelolaan dana Desa masih rendah.
2. Akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengelolaan dana desa yang ada di Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan ada lima tahap yakni tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Untuk tahap perencanaan, sudah dilakukan dengan baik dan mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku artinya untuk tahap ini proses

B. Saran

Untuk Pemerintah Desa Karanganyar Agar melaporkan kinerja serta menunjukkan laporan keuangan kepada Masyarakat agar mengetahui anggaran yang digunakan sehingga tidak muncul prasangka negative kepada Pemerintah Desa serta Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk Sumber Daya Manusia (SDM) agar lebih ahli dalam hal teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit, 2004.
- Anwar (BPD), Wawancara, Lamongan 17 Juni 2019
- Arif, Bahtiar, “*Akuntansi Pemerintahan*”, (Jakarta : Akademia, 2009)
- Bastian, Indra, “*Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa*”, (Jakarta : Erlangga, 2015)
- BPKP. (2015). Membangun Good Governance Menuju Clean Government. *Warta Pengawasan Vol. Xxii/ Edisi Hut Ke-70 Ri/2015, ISSN: 0854-0519*. 17 November 2016. www.Bpkp.Go.Id.
- Bungin , M. Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi : Format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran*. Jakarta : Kencana, 2013.
- Chairunnissa, Connie. *Metode Penelitian Ilmiah : Aplikasi dalam Pendidikan dan Sosial*. Jakarta : Mitra Wacana Media, 2017.
- Chalid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara, 1997.
- Didjaja, Mustopa, “*Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi Kinerja*”, (Jakarta : Lan dan Duta Pertiwi, 2003)
- Dwi Febri Arifiyanto dan Taufik Kurrohman. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi dan keuangan*, Volume 2 (3), 2014.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya, 2017.
- Hamzah, Ardi. *Tata Kelola Pemerintah Desa : Menuju Desa Mandiri, Sejahtera dan Partisipatoris*. Surabaya : Pustaka, 2015
- Herlianto, Didit, “*Manajemen Keuangan Desa*”, (Yogyakarta : Gosyen Publishing, 2017)
- Hery, “*Akuntansi untuk Pemula*”, (Yogyakarta : Gava Media, 2014)
- I Nyoman Judarmita & Ni Luh Supadmi. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.21.3, (Bulan Desember,2017).

- Ian Charis (Bendahara Desa), Wawancara, Lamongan 10 Juni 2019
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin “*Etika Birokrasi Dan Akuntabilitas Pemerintahan*”, (Malang : Intrans Publishing, 2017)
- Kholmi, Masiyah. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa : Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Jurnal Ekonomika Bisnis* Volume 07 No.2 (Bulan Juli,2016).
- Krina, Loina Lalolo “*Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi*”, (Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003)
- Kristianten, “*Transparansi Anggaran Pemerintah*”, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006)
- Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan RI, “*Akuntabilitas Dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip)*”, (Jakarta : LAN BPKP RI, 2000)
- Lina Nasehatun Nafidah & Nur Anisa. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Jurnal Ilmu Akuntansi*, Volume 10 (2), (Bulan Oktober,2017).
- Lukito, Penny Kusumastuti, “*Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Ke Depan*”, (Jakarta : PT. Grasindo Anggota Ikapi, 2014)
- M. Ainur Rofiq (Kepala Desa), Wawancara, Lamongan 22 Mei 2019
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI Yogyakarta, 2004.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif : paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu social lainnya*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mursyidi, “*Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*”, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009)
- Mursyidi. *Akuntansi Dasar*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- Nur Hadi (Masyarakat Desa), Wawancara, Lamongan 10 Juni 2019
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

PERMENDES Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

PMK Nomor 49/Pmk.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta, 2010.

Suharno (Sekretaris Desa), Wawancara, Lamongan 10 juni 2019

Sujarweni, V. Wiratna, “*Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*”, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015)

Tahir, Arifin, *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta, 2014

Tambuwwun, Fernando Victory et al. *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa dalam Pengelolaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Volume 13 (4), 2018.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Wida, Siti Ainul et al. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. *E-journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Volume IV (2), 2017.

Yuliansyah & Rusmianto, *Akuntansi Desa*. Jakarta : Salemba Empat, 2016